Jurnal Kajian Sosial Humaniora

Volume 1 Number 4 2025, pp 255-270
ISSN: 3064-0318 (Online)
DOI: https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.30
Received: May 20, 2025; Revised: June 20, 2025; Accepted: June 30, 2025

Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pasca-Reformasi

Ratna Dewi[1], Reno Fernandes[2*], Suryanef Suryanef[3]
Universitas Negeri Padang
*Corresponding author, e-mail: renofernandes@fis.unp.ac.id

Abstrak

Reformasi 1998 menandai perubahan besar dalam sistem politik dan pendidikan di Indonesia, termasuk terbukanya ruang partisipasi politik bagi generasi muda. Namun, tingkat partisipasi politik pemuda masih tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS (2022) yang mencatat hanya 33,4% pemuda aktif dalam diskusi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda pasca-reformasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis 4 dokumen kurikulum resmi, 10 jurnal akademik, dan 6 regulasi pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka, melalui penguatan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, memberikan peluang besar untuk menanamkan nilai demokrasi, berpikir kritis, dan partisipasi sosial-politik sejak dini. Temuan ini diperkuat oleh teori pendidikan kritis Paulo Freire, yang menempatkan peserta didik sebagai agen perubahan sosial. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap ada, seperti keterbatasan pelatihan guru, budaya sekolah yang belum demokratis, dan rendahnya literasi politik digital.Optimalisasi kurikulum merdeka memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas pendidik, dan lingkungan belajar yang partisipatif untuk mendorong keterlibatan politik generasi muda secara aktif dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Generasi muda; Kurikulum Merdeka, Partisipasi politik; Reformasi.

Abstract

The 1998 Reform era marked a significant transformation in Indonesia's political and educational systems, particularly through the expansion of political participation opportunities for the younger generation. However, youth political engagement remains relatively low, as shown by data from Statistics Indonesia (BPS, 2022), which reported that only 33.4% of youth actively participated in political discussions. This study aims to examine the role of the Merdeka Curriculum in enhancing political awareness and participation among young people in post-reform Indonesia. Using a literature review method, the analysis draws on four official curriculum documents, ten academic journals, and six national education regulations. The findings indicate that the Merdeka Curriculum through the integration of Profil Pelajar Pancasila (Pancasila Student Profile) values and project-based learning approaches offers significant potential to foster democratic values, critical thinking, and socio-political participation from an early age. These insights align with Paulo Freire's theory of critical pedagogy, which emphasizes the role of students as agents of social change. Nevertheless, challenges remain in its implementation, such as limited teacher training, undemocratic school cultures, and low levels of political digital literacy.Optimizing the Merdeka Curriculum requires policy support, enhanced educator capacity, and a participatory learning environment to encourage active and responsible political engagement among youth.

Keywords: Kurikulum Merdeka; Political participation; Reform; Youth.

ISSN: 3064-0318

How to Cite: Dewi, R., Fernandes, R. & Suryanef, S. (2025). Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pasca-Reformasi. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 1(4), 255-270.

This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut tidak hanya menandai berakhirnya kekuasaan yang sentralistik dan represif, tetapi juga membuka jalan bagi era Reformasi yang ditandai dengan keterbukaan, demokratisasi, dan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sistem politik dan pendidikan. Menurut Ni'matul Huda (2008:196), Reformasi membawa arah baru dalam penyelenggaraan negara, terutama melalui pelembagaan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat secara lebih luas dalam kehidupan politik.

Di masa Orde Baru, ruang partisipasi politik masyarakat, khususnya generasi muda, sangat terbatas dan dikontrol ketat oleh negara. Namun, setelah Reformasi, terjadi transformasi besar dalam sistem pemerintahan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peran yang sangat vital, terutama dalam membangun kesadaran politik dan demokrasi di kalangan generasi muda. Pendidikan politik tidak hanya diperlukan untuk memperkenalkan sistem dan proses politik, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap kritis, tanggung jawab sebagai warga negara, dan semangat partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi politik generasi muda merupakan aspek krusial dalam menjaga keberlanjutan demokrasi suatu bangsa. Di Indonesia, era pasca-reformasi membuka ruang kebebasan politik yang lebih luas, termasuk bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik secara konvensional seperti menggunakan hak pilih, maupun secara non-konvensional seperti menyuarakan aspirasi melalui media digital. Meski demikian, partisipasi politik generasi muda Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih muda cukup besar, tingkat partisipasi aktif mereka dalam proses politik belum maksimal, terutama dalam hal pemahaman isu politik, keterlibatan dalam organisasi sosial-politik, serta kemampuan kritis dalam menyikapi dinamika politik nasional (KPU, 2020; Putri & Siregar, 2021).

Sejumlah studi terdahulu banyak menyoroti faktor-faktor seperti pengaruh media sosial (Ramadhan, 2019), budaya politik keluarga (Lestari, 2022), dan sistem demokrasi digital (Aditya, 2020) sebagai penentu partisipasi politik anak muda. Namun, sedikit sekali penelitian yang secara khusus menelaah peran pendidikan formal, terutama kurikulum, dalam membentuk kesadaran dan perilaku politik generasi muda. Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan sejak tahun 2022 membawa paradigma baru dalam pembelajaran, dengan menekankan pada pembentukan Profil Pelajar Pancasila yang salah satu dimensinya adalah berpartisipasi dalam kehidupan demokratis secara aktif dan bertanggung jawab (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum ini memberi ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, sikap kebinekaan, serta partisipasi sosial—komponen-komponen penting dalam literasi dan kesadaran politik.

Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana Kurikulum Merdeka berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi politik generasi muda. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk, kebijakan, dan dampak pendidikan politik yang berkembang di era Reformasi pasca-1998, dengan fokus pada kontribusinya terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Dalam konteks Kurikulum Merdeka yang saat ini diterapkan, artikel ini juga akan mengulas bagaimana pendekatan pendidikan baru ini dapat memperkuat partisipasi politik generasi muda melalui pembelajaran yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan.

Demokrasi pada hakikatnya bukan hanya sebuah sistem pemerintahan, tetapi juga sebuah proses yang berkelanjutan yang menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Robert A. Dahl (1998) menekankan bahwa partisipasi politik merupakan fondasi utama dari demokrasi yang sehat. Dalam sistem demokratis, semua warga negara memiliki hak untuk berpendapat, memilih, dan berkontribusi dalam proses politik. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi, terutama dari generasi muda, menjadi indikator penting dalam menilai keberlangsungan demokrasi di suatu negara. Partisipasi politik menjadi fondasi utama dalam demokrasi, di mana setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, memilih pemimpin, dan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan. Dalam konteks ini, partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti diskusi publik, demonstrasi, dan kegiatan organisasi masyarakat sipil.

Paulo Freire (1970) dalam karya monumentalnya *Pedagogy of the Oppressed*, memperkenalkan pendekatan pendidikan kritis yang menekankan bahwa pendidikan

seharusnya menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Pendidikan kritis bertujuan membentuk kesadaran (conscientização), di mana peserta didik diajak untuk memahami realitas sosial-politik di sekitarnya dan terdorong untuk melakukan perubahan. Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan ini sangat relevan karena mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mempertanyakan ketidakadilan, serta memahami perannya sebagai agen perubahan dalam masyarakat demokratis. Freire berargumen bahwa pendidikan tidak seharusnya bersifat bankir, di mana pengetahuan hanya ditransfer dari pengajar kepada siswa, tetapi harus melibatkan dialog dan refleksi kritis. Dalam konteks pendidikan politik, pendekatan ini sangat relevan, karena dapat membantu generasi muda untuk memahami struktur kekuasaan, hak-hak mereka sebagai warga negara, dan pentingnya keterlibatan dalam proses demokrasi. Dengan pendidikan yang kritis, generasi muda diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, sehingga mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Pemilih pemula, yang umumnya berasal dari kalangan remaja atau generasi muda yang baru memasuki usia memilih, merupakan kelompok strategis dalam pembangunan demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik sejak usia muda sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, demokrasi, dan partisipasi aktif. Wahab (2016) menekankan bahwa pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), termasuk pendidikan politik di dalamnya, berperan dalam membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Pendidikan IPS bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan kesadaran sosial dan politik yang diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa bekal pemahaman politik yang cukup, pemilih pemula rentan terhadap manipulasi informasi dan pragmatisme politik. Pendidikan formal melalui kurikulum sekolah, termasuk Kurikulum Merdeka, dapat menjadi sarana efektif dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang sadar dan terlibat aktif dalam pembangunan demokrasi. Sejalan dengan itu, Marzali (2016) menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan bagian integral dari pembentukan identitas kewargaan dan instrumen strategis dalam memperkuat demokrasi sejak usia dini.

Menurut Amy Gutmann dalam bukunya "Democratic Education" (1999), pendidikan demokratis memiliki peran yang krusial dalam membentuk individu yang tidak hanya terdidik, tetapi juga berkomitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Gutmann berargumen bahwa pendidikan harus memfasilitasi pengembangan kemampuan individu untuk berpikir kritis, berpartisipasi dalam diskusi publik, dan mengambil keputusan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Gutmann

menekankan bahwa pendidikan demokratis tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk membangun karakter dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi bagian integral dari kurikulum, di mana siswa diajarkan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk terlibat dalam proses politik.

Lebih lanjut, Gutmann menggarisbawahi pentingnya inklusivitas dalam pendidikan demokratis, di mana semua suara, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, harus didengar dan dihargai. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mempersiapkan individu menjadi pemilih yang cerdas, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Pentingnya pendidikan politik dalam konteks ini sejalan dengan pandangan Gutmann bahwa pendidikan harus berkontribusi pada penguatan demokrasi, dengan membekali generasi muda dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) sebagai pendekatan utama untuk menganalisis peran Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda pasca-reformasi. Studi pustaka dipilih karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji wacana, konsep, dan kebijakan yang tertuang dalam dokumen-dokumen resmi serta literatur ilmiah yang relevan, tanpa melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung. Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari 4 dokumen kurikulum resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, yaitu *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka (2022)*, *Capaian Pembelajaran IPS Fase D (2022)*, *Modul Ajar IPS SMP (2023)*, dan *Profil Pelajar Pancasila (2021)*. Kemudian jurnal akademik nasional terakreditasi dan internasional bereputasi yang membahas tentang pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik pemuda, dan implementasi Kurikulum Merdeka, yang diperoleh dari portal seperti Google Scholar, DOAJ, dan Garuda Dikti. Selanjutnya regulasi pendidikan yang meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan dan Kurikulum Merdeka.

Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu dengan mengidentifikasi dan menginterpretasikan isi dari dokumen dan literatur yang dikaji untuk menilai sejauh mana kurikulum secara normatif dan praktis memuat nilai-nilai partisipasi politik, serta potensi pengaruhnya terhadap generasi muda dalam konteks pasca-reformasi. Metode studi pustaka memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan ini tidak mencakup data empiris langsung dari siswa, guru, atau pemangku kebijakan pendidikan, sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi aktual di lapangan secara komprehensif. Kedua, interpretasi terhadap dokumen dan literatur bersifat subjektif dan bergantung pada pengetahuan serta perspektif peneliti. Ketiga, karena sumber data bergantung pada ketersediaan dan aksesibilitas publikasi, kemungkinan terdapat literatur penting yang belum terjangkau atau tidak dimasukkan dalam analisis. Meski demikian, studi pustaka tetap memiliki relevansi tinggi dalam membangun kerangka teoretis dan memberikan landasan awal bagi penelitian lebih lanjut, khususnya dalam mengkaji integrasi nilai-nilai politik dalam sistem pendidikan nasional Indonesia melalui Kurikulum Merdeka.

Hasil dan Pembahasan

Reformasi 1998 dan Lahirnya Tatanan Politik Baru

Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Gerakan reformasi yang dipicu oleh krisis multidimensi dan runtuhnya rezim Orde Baru membawa perubahan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Salah satu hasil utama reformasi adalah terbukanya ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk generasi muda. Menurut Ni'matul Huda (2008, hlm. 196), reformasi telah membawa arah baru dalam penyelenggaraan negara, terutama melalui pelembagaan prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi rakyat secara lebih luas dalam kehidupan politik. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai kebijakan dan undang-undang yang menjamin hak kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, dan hak memilih secara langsung, termasuk bagi pemilih pemula yang sebagian besar berasal dari kalangan generasi muda. Senada dengan itu, Hadiz dan Robison (2004) menyatakan bahwa reformasi politik di Indonesia telah membuka ruang demokrasi yang lebih besar, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi tantangan oligarki dan dominasi elit. Namun, secara formal, sistem politik pascareformasi memberikan peluang lebih besar bagi kaum muda untuk terlibat dalam proses politik melalui jalur organisasi kemasyarakatan, partai politik, hingga pemilihan umum.

Dalam konteks ini, tatanan politik baru pascareformasi menempatkan pendidikan sebagai salah satu instrumen strategis dalam membangun kesadaran politik generasi muda. Pendidikan politik tidak lagi hanya disampaikan melalui media massa atau aktivitas partai politik, tetapi juga mulai diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Budiardjo (2008), yang menekankan bahwa partisipasi politik yang sehat perlu dibentuk sejak usia muda melalui pendidikan politik yang terstruktur dan sistematis. Lahirnya Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional merupakan respons terhadap kebutuhan generasi muda yang hidup di era demokrasi. Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga pengembangan karakter dan partisipasi sosial. Salah satu dimensi Profil Pelajar Pancasila yang diusung dalam Kurikulum Merdeka adalah "bergotong royong" dan "berkebinekaan global", yang mencerminkan nilai-nilai demokratis dan keterlibatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Kemendikbudristek, 2022).

Salah satu perubahan penting dalam amandemen tersebut adalah pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menjadi maksimal dua periode, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen. Pembatasan ini menjadi langkah awal dalam mencegah dominasi kekuasaan yang terpusat dan membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih sehat dan akuntabel. Perubahan ini juga mencerminkan pergeseran paradigma kekuasaan dari yang otoriter menuju sistem pemerintahan yang lebih partisipatif dan berbasis hukum. Tantangan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai politik dalam Kurikulum Merdeka tidaklah ringan. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang bersifat normatif dengan praktik pembelajaran di kelas. Beberapa guru masih fokus pada capaian akademik semata, tanpa menggali potensi kurikulum untuk membentuk warga negara yang aktif dan kritis. Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah upaya memanusiakan manusia secara utuh, termasuk kesadaran sebagai bagian dari masyarakat dan bangsa.

Transformasi politik ini turut memengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan tidak lagi menjadi alat indoktrinasi negara sebagaimana pada masa Orde Baru, melainkan diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis, partisipasi warga negara, dan penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi. Hal ini selaras dengan gagasan Paulo Freire (1970) tentang pendidikan sebagai proses pembebasan, di mana peserta didik harus diberdayakan untuk memahami struktur sosial-politik dan mengambil peran aktif dalam perubahan sosial. Dengan demikian, Reformasi 1998 bukan hanya menghasilkan perubahan struktural dalam sistem pemerintahan, tetapi juga membuka

peluang bagi pendidikan untuk berperan lebih signifikan dalam membentuk karakter warga negara yang demokratis dan partisipatif. Ini menjadi fondasi awal bagi pengembangan kurikulum dan pendekatan pembelajaran yang lebih berpihak pada kebebasan berpikir dan keterlibatan aktif generasi muda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Desentralisasi Pendidikan dan Otonomi Daerah

Salah satu dampak penting dari Reformasi 1998 adalah lahirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang secara langsung memengaruhi sektor pendidikan. Sebelum reformasi, kebijakan pendidikan cenderung bersifat sentralistik, dengan dominasi pemerintah pusat dalam menentukan isi kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan di seluruh Indonesia. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (dan kemudian UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), pengelolaan pendidikan mengalami perubahan signifikan. Pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih luas dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk dalam hal pengembangan kurikulum kontekstual yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Menurut Tilaar (2000), desentralisasi pendidikan adalah salah satu cara untuk mendekatkan pendidikan dengan masyarakatnya. Ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya mencerminkan kebutuhan sosial, budaya, dan politik daerah, sehingga peserta didik tidak tercerabut dari realitas kehidupan sekitarnya. Dalam konteks ini, desentralisasi membuka peluang bagi daerah untuk menyisipkan nilai-nilai lokal dalam pendidikan kewarganegaraan, termasuk penanaman nilai partisipasi politik secara lebih kontekstual. Hal ini diperkuat oleh pendapat Mulyasa (2007), yang menyatakan bahwa melalui desentralisasi, sekolah diberi ruang untuk lebih mandiri dalam mengembangkan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter dan partisipasi sosial siswa. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya menjadi sarana transmisi pengetahuan, tetapi juga wadah pembentukan warga negara yang sadar dan aktif dalam kehidupan demokrasi.

Kurikulum Merdeka yang diluncurkan pascareformasi merupakan bentuk konkret dari semangat desentralisasi pendidikan. Kurikulum ini memberi keleluasaan kepada guru dan satuan pendidikan untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal serta kebutuhan peserta didik. Guru tidak lagi terikat secara kaku oleh struktur kurikulum nasional, melainkan didorong untuk mengembangkan modul ajar, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, serta kegiatan pembelajaran berbasis isu-isu sosial, termasuk partisipasi politik. Kurikulum Merdeka memberi peluang untuk mengangkat

isu-isu aktual politik dan demokrasi lokal ke dalam kelas. Misalnya, guru dapat mengembangkan proyek pembelajaran berbasis tema "partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah" atau "peran pemuda dalam musyawarah desa." Pendekatan ini sejalan dengan tujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya mengetahui hak dan kewajiban politik, tetapi juga terlibat secara aktif dalam proses-proses demokrasi lokal.

Penerapan Kurikulum Merdeka di daerah tidak lepas dari tantangan. Penelitian dari Rizqi dan Fitria (2022) menunjukkan bahwa belum semua guru memahami filosofi dasar Kurikulum Merdeka, dan masih ada daerah yang kekurangan sumber daya untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek atau partisipatif. Ini menjadi ironi dalam konteks otonomi daerah, di mana keberhasilan desentralisasi pendidikan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pemerintah daerah serta kualitas sumber daya manusianya. Desentralisasi pendidikan dan otonomi daerah telah menciptakan peluang penting bagi peningkatan partisipasi politik generasi muda, khususnya melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Namun, tanpa dukungan sumber daya, pelatihan guru, dan komitmen pemda, potensi tersebut belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, kolaborasi antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pendidikan benar-benar menjadi instrumen transformasi demokratis.

Pendidikan Politik dalam Kurikulum dan Kebijakan

Pendidikan dan politik merupakan dua ranah yang saling terkait dalam proses pembangunan bangsa. Kurikulum sebagai bagian dari kebijakan pendidikan bukanlah instrumen netral; ia selalu mencerminkan ideologi, kepentingan, dan arah politik negara. Oleh karena itu, bagaimana politik diartikulasikan dalam kurikulum sangat menentukan sejauh mana pendidikan mampu membentuk generasi muda yang sadar politik, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis. Menurut Apple (2004), kurikulum adalah medan perjuangan ideologis. Ia menyatakan bahwa kebijakan kurikulum tidak hanya tentang apa yang diajarkan, tetapi juga siapa yang menentukan isi pengajaran dan tujuan pendidikan. Dalam konteks Indonesia pasca-reformasi, kebijakan pendidikan mengalami pergeseran dari pendekatan indoktrinatif pada masa Orde Baru ke arah yang lebih demokratis, partisipatif, dan kontekstual.

Perubahan ini terlihat dalam peluncuran Kurikulum Merdeka yang mengusung paradigma pembelajaran yang berpusat pada siswa, serta penguatan nilai-nilai kebinekaan, demokrasi, dan gotong royong melalui Profil Pelajar Pancasila. Salah satu elemen kunci dari Profil Pelajar Pancasila adalah dimensi "bergotong royong" dan "berkebinekaan global", yang menekankan pentingnya partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sebagai bagian dari pendidikan karakter. Kebijakan ini sejalan dengan

pandangan Paulo Freire (1970), yang menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi alat pembebasan, bukan penindasan. Freire menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientização*) dalam pendidikan, yaitu kemampuan peserta didik untuk memahami realitas sosial dan bertindak sebagai agen perubahan. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, penguatan pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman normatif terhadap sistem politik, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran politik yang aktif.

Dalam dokumen *Capaian Pembelajaran IPS Fase D* (Kemendikbudristek, 2022), peserta didik diharapkan mampu memahami sistem pemerintahan Indonesia, proses pemilu, hak dan kewajiban warga negara, serta menunjukkan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Pendekatan berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka mendorong guru dan peserta didik untuk mengangkat isu-isu aktual seperti pemilihan kepala daerah, kebijakan publik, hingga advokasi sosial sebagai bahan pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Realisasi politik dalam kurikulum seringkali menghadapi tantangan. McLaren (2007) menyoroti bahwa pendidikan politik dalam kurikulum dapat mengalami penyempitan makna apabila hanya didekati secara formalistik dan minim refleksi kritis. Banyak sekolah yang masih membatasi diskusi politik karena dianggap sensitif atau berisiko, padahal keterlibatan siswa dalam memahami dan mengkritisi realitas politik merupakan bagian penting dari pembelajaran demokrasi.

Di Indonesia, kekhawatiran semacam ini juga muncul. Penelitian dari Ichsan & Nuryadin (2021) mengungkap bahwa sebagian guru masih enggan membahas isu politik kontemporer di kelas karena kekhawatiran terhadap resistensi dari orang tua atau pengawasan dari pihak sekolah. Ini menunjukkan masih adanya ketegangan antara semangat kurikulum yang progresif dan realitas pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Politik dalam kurikulum dan kebijakan tidak hanya dilihat dari keberadaannya secara formal dalam dokumen kurikulum, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai politik tersebut diinternalisasi dalam proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang yang luas untuk penguatan pendidikan politik generasi muda. Namun, optimalisasi peran tersebut menuntut keberanian, kompetensi, dan dukungan kebijakan yang konsisten agar partisipasi politik benar-benar tumbuh dari ruang-ruang kelas hingga ke ranah publik.

Pemuda dan Peran Pemilih Pemula dalam Demokrasi

Pemuda merupakan kekuatan sosial dan politik yang strategis dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks negara pascareformasi, peran pemuda terutama sebagai pemilih pemula sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan

publik, pemerintahan, dan kepemimpinan nasional. Oleh karena itu, pendidikan politik bagi pemuda melalui jalur formal seperti sekolah menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran demokratis sejak dini. Menurut Huntington dan Nelson (1976), keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada partisipasi politik yang luas dan terdidik dari seluruh warga negara, termasuk kaum muda. Pemuda tidak hanya dilihat sebagai kelompok usia, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-politik yang membawa nilai-nilai baru ke dalam sistem demokrasi.

Di Indonesia, jumlah pemilih pemula terus meningkat setiap pemilu. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa pada Pemilu 2024, sekitar 52% pemilih berasal dari kalangan milenial dan generasi Z. Hal ini menunjukkan bahwa generasi muda memegang peranan penting dalam menentukan hasil pemilu, namun partisipasi mereka masih kerap bersifat simbolik dan tidak substantif. Banyak dari mereka belum memiliki kesadaran politik yang matang atau cenderung apatis terhadap isu-isu kebangsaan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Kurikulum ini memberikan ruang pembelajaran yang mendorong siswa berpikir kritis, memahami realitas sosial-politik, dan mengambil peran aktif dalam masyarakat. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek, diskusi isu-isu aktual, dan integrasi nilai-nilai demokrasi dalam mata pelajaran IPS dan Pendidikan Pancasila menjadi kunci penguatan peran pemilih pemula.

Menurut Sudibyo (2019), pendidikan kewarganegaraan yang efektif harus mampu menghubungkan antara teori politik dengan praktik demokrasi di kehidupan sehari-hari siswa. Oleh karena itu, Kurikulum Merdeka berpotensi mendorong siswa untuk tidak hanya memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga terlibat dalam simulasi pemilu, forum pelajar, kegiatan musyawarah kelas, hingga aksi sosial yang membangun semangat partisipatif. Senada dengan itu, Yulianto (2022) menekankan pentingnya pendekatan dialogis dalam pendidikan politik bagi generasi muda. Ia menyatakan bahwa keterlibatan aktif siswa dalam membahas isu-isu politik lokal dan nasional akan menumbuhkan keberanian untuk menyuarakan pendapat serta kemampuan berpikir kritis terhadap kebijakan publik.

Fernandes,R (2021) menegaskan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan informasi yang sangat kompleks dan cepat berubah, sehingga pendidikan politik yang efektif tidak bisa lagi hanya bersifat teoritis atau normatif. Fernandes menekankan perlunya kurikulum yang mampu mengintegrasikan literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi agar pemilih pemula dapat membuat keputusan politik

yang rasional, tidak terjebak dalam disinformasi, dan mampu berperan aktif dalam ruang publik secara etis. Dalam konteks ini, Kurikulum Merdeka menjadi peluang strategis karena memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk mengaitkan pembelajaran dengan isu-isu kontemporer yang dekat dengan kehidupan siswa, termasuk dinamika politik digital.

Studi dari Widiatmoko & Sari (2023) menunjukkan bahwa sebagian sekolah belum optimal dalam mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam pembelajaran karena keterbatasan pemahaman guru, kurangnya pelatihan, serta minimnya materi kontekstual yang relevan dengan dunia pemuda. Di sisi lain, faktor budaya sekolah yang masih menekankan kepatuhan daripada kebebasan berpendapat juga menjadi penghambat tumbuhnya iklim demokratis di lingkungan pendidikan. Meskipun demikian, Kurikulum Merdeka membuka peluang besar bagi pendidikan politik yang lebih bermakna dan partisipatif. Dengan dukungan pelatihan guru, penyediaan modul pembelajaran yang relevan, dan lingkungan sekolah yang mendukung kebebasan berpendapat, peran pemilih pemula dalam demokrasi Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

Tantangan dan Harapan Pendidikan Politik Pasca-Reformasi

Reformasi 1998 membuka peluang besar bagi pembaruan politik dan demokratisasi di Indonesia, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu ekspektasi besar pascareformasi adalah hadirnya pendidikan politik yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis dan partisipasi aktif generasi muda dalam proses politik. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa transformasi pendidikan politik masih menghadapi tantangan signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), hanya 33,4% pemuda Indonesia (usia 17–30 tahun) yang aktif mengikuti diskusi politik, dan kurang dari 20% yang berpartisipasi dalam kegiatan organisasi politik atau sosial kemasyarakatan. Rendahnya partisipasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi demografis pemuda dan peran aktif mereka dalam demokrasi. Salah satu penyebabnya adalah pendekatan pendidikan politik di sekolah yang masih dominan bersifat teoritis dan minim praktik. Dwiyanto (2014) menyebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih cenderung mengajarkan norma dan hafalan, alih-alih memberdayakan siswa untuk berpikir kritis dan bertindak sebagai warga negara yang aktif. Hal ini menyebabkan politik dianggap sebagai sesuatu yang jauh, rumit, dan tidak relevan oleh sebagian besar siswa.

Fernandes (2021) juga menyoroti tantangan era digital yang memperburuk situasi ini. Menurutnya, meskipun generasi muda sangat aktif di media sosial, mereka kerap

terpapar informasi politik yang dangkal atau bahkan menyesatkan. Tanpa pendidikan literasi politik digital yang memadai, generasi muda rentan terhadap polarisasi dan manipulasi informasi politik. Di tengah tantangan ini, Kurikulum Merdeka muncul sebagai peluang untuk membenahi pendidikan politik. Kurikulum ini memberikan ruang lebih luas bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan konteks lokal, kebutuhan siswa, dan isu-isu aktual. Misalnya, dalam pelajaran IPS dan Pendidikan Pancasila, sekolah dapat menyelenggarakan proyek berbasis isu-isu sosial, seperti simulasi pemilu, diskusi kebijakan publik, atau pelibatan siswa dalam forum musyawarah sekolah.

Implementasi Kurikulum Merdeka di beberapa sekolah telah menunjukkan dampak positif. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek (2023), sebanyak 67% satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum Merdeka melaporkan peningkatan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran berbasis proyek sosial dan demokrasi sekolah. Salah satu contohnya adalah kegiatan "Pemilu OSIS Transparan" di SMPN 10 Padang, yang tidak hanya melatih siswa memilih, tetapi juga menyusun visi-misi, berdebat, dan mempertanggungjawabkan program kerja. Penerapan ini sejalan dengan konsep pendidikan kritis Paulo Freire (1970), yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat pembebasan. Dalam kerangka ini, peserta didik tidak hanya diposisikan sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai subjek yang aktif, mampu memahami realitas sosial-politik, dan bertindak untuk mengubahnya. Kurikulum Merdeka, jika diterapkan dengan pendekatan kritis, dapat membentuk kesadaran politik yang reflektif dan partisipatif.

Hambatan struktural masih menjadi kendala. Studi Widiatmoko dan Sari (2023) menemukan bahwa 48% guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengintegrasikan isu-isu sosial dan politik ke dalam pembelajaran. Selain itu, masih banyak sekolah yang belum mengembangkan budaya demokratis secara menyeluruh. Dalam lingkungan sekolah yang otoriter dan kaku, upaya menumbuhkan partisipasi siswa sering kali terhambat. Tantangan dan harapan pendidikan politik pascareformasi bergantung pada keseriusan semua pihak dalam merealisasikan semangat Kurikulum Merdeka. Jika dikelola secara progresif, kurikulum ini dapat menjadi katalisator bagi terbentuknya generasi muda yang tidak hanya sadar politik, tetapi juga kritis, rasional, dan aktif dalam proses demokratisasi bangsa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda di era pascareformasi. Dengan fleksibilitas, pendekatan berbasis proyek, serta fokus pada pembentukan karakter dan nilai-nilai demokrasi melalui Profil Pelajar Pancasila, kurikulum ini dapat menjadi wahana strategis dalam menginternalisasikan kesadaran politik sejak dini. Meskipun desain kurikulum telah memadai, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa kesiapan guru, budaya sekolah yang belum demokratis, dan minimnya literasi politik di kalangan siswa. Selain itu, pengaruh media digital dan rendahnya daya kritis generasi muda terhadap informasi politik menambah kompleksitas permasalahan ini. Kurikulum Merdeka baru akan efektif meningkatkan partisipasi politik generasi muda jika didukung oleh ekosistem pendidikan yang demokratis, pelatihan guru yang memadai, dan penguatan pendidikan politik berbasis konteks kehidupan nyata.

Saran bagi pemerintah dan pembuat kebijakan perlu memperkuat pelatihan dan pendampingan guru dalam menerapkan pendekatan pembelajaran politik yang kontekstual, interaktif, dan berbasis literasi digital. Pemerintah perlu menyusun modul atau panduan tematik tentang pendidikan politik berbasis Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bersifat studi pustaka dan belum mencakup data lapangan secara langsung. Literatur yang dianalisis terdiri dari sejumlah dokumen kurikulum, jurnal akademik, buku teori pendidikan politik, dan laporan kebijakan. Karena keterbatasan metode ini, temuan dalam artikel ini lebih bersifat konseptual dan belum mencerminkan variasi penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai daerah atau tingkat satuan pendidikan yang berbeda.

Daftar Pustaka

Aditya, R. (2020). *Demokrasi digital dan partisipasi politik generasi Z*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.

Apple, M. W. (2004). *Ideology and curriculum*. Routledge.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik* (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). *Indikator pemuda Indonesia 2022*. https://www.bps.go.id

Dwiyanto, A. (2014). *Membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Fernandes, R. (2021). *Literasi politik digital dan Generasi Z*. Literasi Nusantara.

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the oppressed*. New York: Continuum.

Gutmann, A. (1999). *Democratic education* (Updated ed.). Princeton University Press.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). *Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets*. RoutledgeCurzon.

Huda, N. (2008). *Hukum tata negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ichsan, M., & Nuryadin, E. (2021). Tantangan guru dalam mengintegrasikan isu politik dalam pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 11(2), 101–114.

Kemendikbudristek. (2022). *Panduan implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2022). *Capaian pembelajaran IPS fase D*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kemendikbudristek. (2023). *Laporan implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.

Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2020). *Laporan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2019*. Jakarta: KPU RI.

Lestari, D. A. (2022). Pengaruh budaya politik keluarga terhadap partisipasi politik remaja. *Jurnal Politik dan Masyarakat, 11*(2), 115–128.

Marzali, A. (2016). Pendidikan politik dan pembentukan identitas kewargaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(1), 45–58.

McLaren, P. (2007). *Critical pedagogy and predatory culture: Oppositional politics in a postmodern era*. Routledge.

Mulyasa, E. (2007). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Putri, A., & Siregar, H. (2021). Partisipasi politik generasi milenial di Indonesia: Antara idealisme dan pragmatisme. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25*(1), 35–50.

Ramadhan, A. (2019). Media sosial dan kesadaran politik generasi muda. *Jurnal Komunikasi Politik, 7*(1), 22–34.

Rizqi, N., & Fitria, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah tertinggal: Antara harapan dan kenyataan. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 9*(1), 45–60.

Sudibyo, A. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan kesadaran politik siswa. *Jurnal Demokrasi dan Pendidikan, 5*(1), 22–30.

Tilaar, H. A. R. (2000). *Manajemen pendidikan nasional: Kajian strategis kebijakan pendidikan nasional dalam abad ke-21*. Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, A. (2016). Pendidikan IPS dan pembentukan warga negara yang demokratis. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, 12*(2), 77–89.

Widiatmoko, B., & Sari, T. R. (2023). Tantangan implementasi pendidikan politik dalam Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan, 11*(3), 201–215.

Yulianto, A. (2022). Pendidikan politik bagi generasi Z: Pendekatan dialogis dalam kurikulum sekolah. *Jurnal Pendidikan Sosial, 8*(2), 134–147.